

## References

- Alam, Gigih Sari. Retrieved June 22, 2009, from <http://www.scribd.com/doc/4095733/Sejarah-Beridirinya-Pers-Islamis-dan-Harian-Republika>
- Devereux, Eoin. (2003). *Understanding the Media*. London: SAGE Publications Ltd.
- DPR. (2006). *UU tentang Pornografi dan Pornoaksi*. Retrieved August 5, 2010, from <http://masbadar.com/2008/11/01/download-ruu-app-rancangan-undang-undang-anti-pornografi-dan-pornoaksi/>
- DPR. (2007). *UU tentang Pornografi*. Retrieved August 5, 2010, from <http://masbadar.com/2008/11/01/download-ruu-app-rancangan-undang-undang-anti-pornografi-dan-pornoaksi/>
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana*. Yogyakarta: LKiS.
- Erjavec, Karmen. (2001). Media Representation of the Discrimination against the Roma in Eastern Europe: the Case of Slovenia. *Journal of Discourse and Society*. London: SAGE Publications.
- Fairclough, Norman. (1995). *Critical Discourse Analysis: the Critical Study of Language*. Essex: Addison Wesley Longman Limited.
- Fairclough, Norman. (2001). *Language and Power*. Essex: Pearson Education Limited.
- Fairclough, N. and Wodak, R. (1997). Critical Discourse Analysis. In T.A. van Dijk (ed.). *Discourse as Social Interaction*. London: SAGE Publications Ltd.

- Hornby, A.S., Cowie, A.P.&A.C. Gimson. (1980). *Oxford Advance Dictionary of Current English*. Oxford: Oxford University Press.
- McQuail, Denis. (2005). *McQuail's Mass Communication Theory*. London: SAGE Publications Ltd.
- Muhammad, Imam bin Shâlih al- Utsaimîn. (2008). *Akhlakul Karimah*. Retrieved from [http://www.scribd.com/doc/7215059/Akhlak\\_Mulia](http://www.scribd.com/doc/7215059/Akhlak_Mulia).
- Paltridge, Brian. (2000). *Making Sense of Discourse Analysis*. Queensland: Antipodean Educational Enterprises.
- Radden, Gunter. (2007). The Construction of Meaning in Language. In John Benjamins (Ed). *Aspects of Meaning Construction*. Amsterdam&Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- Rahmawati, Dwi Imanita (2009). *The Construction of Pornography Concept in the Bill of Pornography (RUU APP)*. Unpublished Thesis Airlangga University Surabaya.
- Shore, Bradd. (1991). Twice-Born, Once Conceived: Meaning Construction and Cultural Cognition. *Journal of American Anthropologist; March 1991; 93.1: Proquest Sociology*. Page 9.
- Syafrilan, Dian. Retrieved June 14, 2010, from <http://diansyafrilan99.blogspot.com/2009/04/tugas-komunikasi-massa.html>.

**REPUBLIKA – Jumat, 17 Februari 2006 Halaman : 5 Penulis : hri / zak**

### **Asing Intervensi RUU Anti Pornografi**

JAKARTA – Pihak asing menunjukkan gelagat intervensi terhadap proses pembahasan Rancangan Undang-undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP) di DPR RI. Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU APP, Balkan Kaplate, mengungkapkan pernah didatangi pihak yang mengatasnamakan perwakilan Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS).

Orang asing itu mengkhawatirkan bergulirnya RUU APP menjadi UU. Tentu saja, karena aturan hukum itu akan membentengi bangsa Indonesia dari penghancuran moral lewat industri gaya hidup destruktif yang mereka produksi dengan kedok HAM dan kebebasan berekspresi.

Namun, dengan tegas Balkan menolak intervensi tersebut. “Saya menghimbau negara-negara luar tak mengintervensi kebudayaan bangsa Indonesia. Sebab, kami sedang membangun jiwa dan raga bangsa”, ujarnya, kepada /Republika/, di Jakarta, Kamis (16/02).

DPR saat ini, tegas Balkan, tak akan bisa di intervensi oleh kepentingan asing. Pembahasan RUU APP pun akan jalan terus. Pansus menargetkan, Juni 2006 penggodokan aturan yang akan memerangi pornografi dan pornoaksi itu sudah rampung.

“Naskah RUU APP ini sudah tujuh tahun terkatung-katung. Sudah saatnya disahkan”, tandas Balkan. Ia pun menolak kekhawatiran yang menyatakan RUU APP akan merugikan kaum perempuan. “Merugikan apa ? Justru kita mencoba menempatkan perempuan dalam posisi yang terhormat”.

Kekhawatiran soal RUU APP akan bertindak tak adil kepada perempuan pernah diungkapkan Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Romo Dani Sanusi. Pasalnya, pornografi selalu dilekatkan dengan wanita.

Anggota Pansus, Badriyah Fayumi (Fraksi PKB), menyanggahnya. RUU APP justru ingin melindungi perempuan dari eksploitasi seks dan industri pornografi-pornoaksi. “Pelaku eksploitasi itu akan ditindak”, katanya.

Ia menambahkan, RUU APP lebih mengatur hal-hal yang prinsipal dan menyangkut kepentingan publik. Sedangkan yang bersifat private seperti cara berpakaian masyarakat pedalaman Papua, tidak ikut dipermasalahkan karena itu di luar konteks pornografi dan pornoaksi.

Balkan juga menilai kekhawatiran sebagian kecil kalangan industri pariwisata tak beralasan. Pemda Bali, malah tak keberatan dengan RUU APP, karena tidak akan membatasi terlalu ketat ruang gerak para turis. “Jangan khawatir soal itu. Di Bali juga sudah ada aturannya. Selama di pantai, misalnya, enggan dilarang buka-bukaan dalam batas tertentu. Yang enggak boleh, kalau turis telanjang datang ke sembarang tempat terutama tempat ibadah”, ujar Balkan.

Penolakan terhadap aksi pornografi juga diungkapkan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Jakarta, Ratna Batara Munti. “Kami menolak pornografi, karena menempatkan perempuan sebagai obyek seksual dan mendehumanisasikan perempuan”, ujarnya.

Ratna mengungkapkan, APIK telah memberi masukan kepada Pansus RUU APP berdasarkan kajian di media dan pengalaman mendampingi kasus yang menimpa kaum perempuan. “Kami sepakat akan adanya aturan mengenai pornografi, namun kami melihat substansi RUU APP yang ada saat ini belum menyentuh persoalan inti pornografi”.

LBH APIK berharap RUU APP bisa mengatur secara komprehensif sampai pada tayangan di media dan distribusinya. Sehingga, undang-undangnya nanti dapat melindungi anak-anak dari ancaman pornografi.

\* Isabel diperiksa \*

Dalam kasus pornografi, model Isabel Yahya, kemarin, juga akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Ia menjadi tersangka bersama aktor sinetron Anjasmara. Keduanya berpose “telanjang” atas nama seni dalam pameran/Biennale 2005/, di Gedung Museum Bank Indonesia, Jakarta, tahun lalu.

Usai pemeriksaan, memilih bungkam dari pertanyaan wartawan. Leliana Santoso, asisten Todung Mulya sebagai kuasa hukum Isabel, yang menjawab : penyidik mengajukan 34 pertanyaan seputar kronologis pemotretan dampak hasilnya dipamerkan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes I Ketut Untung Yoga Ana, menjelaskan, Anjasmara dan Isabel dijerat Pasal 282 KUHP tentang delik asusila.

**REPUBLIKA – Kamis, 09 Maret 2006 Halaman : 1 Penulis : dwo/vie/ant**

### **DPR Teruskan Perumusan RUU APP**

JAKARTA – DPR tetap akan meneruskan perumusan Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Sejumlah Fraksi DPR memandang penting terbitnya RUU tersebut. “Merupakan hal yang wajar dalam era demokrasi ada pro dan kontra.

Namun, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Pansus (Panitia Khusus) RUU APP, persentase yang mendukung 70 banding 30. Lebih banyak yang mendukung hadirnya UU APP”, kata Ketua DPR, Agung Laksono, di Jakarta, Rabu (8/3). Perumusan RUU APP harus tetap dilanjutkan, kata Agung, agar masyarakat tidak larut dalam kegelisahan akibat maraknya pornografi dan pornoaksi. Usaha untuk menghilangkan kegelisahan itu, bentuknya dengan membuat rambu-rambu berupa UU.

UU itu selanjutnya akan mengikat seluruh warga negara maupun institusi. Karenanya, jelas Agung, sebelum RUU APP ini diundangkan harus menampung seluruh aspirasi masyarakat. Kemajemukan yang ada harus tetap dihargai dan diperhatikan. Sementara tradisi, adat istiadat, maupun nilai-nilai lokal harus dihormati. “Jangan sampai sebuah UU yang akan menyelamatkan warga Indonesia, tapi ada yang dirugikan dan menimbulkan perpecahan”, ujar Agung.

Senada dengan Agung, sejumlah fraksi di DPR juga menegaskan sikapnya untuk tidak menghentikan perumusan RUU APP. Mereka menilai UU ini diperlukan agar tidak terjadi demoralisasi bangsa. Di negara liberal seperti Amerika Serikat (AS) saja, kata Ketua Fraksi PAN, Abdillah Toha, ada UU yang mengatur masalah pornografi. “Siaran televisi yang masuk ke rumah diatur. Saya bicara soal siaran televisi bukan film ya”, katanya.

Namun, ia meminta agar Pansus RUU APP lebih cermat dan menghindari adanya pasal karet. Penggalan aspirasi harus cermat, sehingga semua pihak diakomodasi dengan baik. Ketua Fraksi PBR, Bursah Zarnubi, menyatakan dukungan dirumuskannya RUU tersebut. Mereka yang merasa keberatan atas perumusan RUU ini, katanya, harus ditampung aspirasinya untuk mencari kata sepakat. Sekretaris Fraksi PPP, Lukman Hakiem, mendukung penuntasan RUU APP. Lukman hanya menyarankan supaya definisi dalam RUU APP harus lebih diperjelas.

Lukman melihat ada pihak tertentu yang sengaja membelokkan wacana pornografi di RUU APP menjadi persoalan isu agama. Ada pula yang menggeser menjadi masalah cara berpakaian. Padahal, RUU ini dimaksudkan untuk menjaga moral bangsa. Penilaian serupa dikemukakan oleh Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid. Ada upaya, kata Hidayat, untuk mengalihkan isu dasar penyelamatan bangsa dari kehancuran moral oleh mereka yang tidak punya budaya malu dan berprinsip hidup permisif.

Hidayat menegaskan bahwa RUU ini tidak dimaksudkan untuk memberantas budaya lokal, pakaian tradisional, tarian tradisional, dan lain-lain. Pakaian tradisional Papua, jelasnya, tidak termasuk dalam konotasi pornografi dan pornoaksi yang diartikan oleh RUU tersebut. UU itu nantinya juga bukan hanya melindungi kaum perempuan, tetapi juga kaum laki-laki. “Yang kita khawatirkan adalah jika budaya malu itu tidak lagi dimiliki, dampaknya orang akan sangat terbiasa untuk melakukan tindak kriminal, korupsi, /human trafficking/, dan lain-lain”, katanya.

Sekjen PDIP, Pramono Anung, menghendaki agar RUU APP itu memisahkan wilayah agama dengan adat masyarakat. Ia memisahkan para pemakai koteka di Papua maupun relief candi Borobudur. “Kita berharap pemerintah dan DPR tidak perlu tergesa-gesa untuk mengesahkan. Sebaiknya, didiskusikan dulu”, katanya.

**REPUBLIKA – Senin, 13 Maret 2006 Halaman : 5 Penulis : hri / ant**

### **Masyarakat Indonesia di Inggris Desak RUU APP Disahkan**

LONDON – Organisasi Islam Indonesia yang berada di Inggris mendesak agar pemerintah secepatnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP), menjadi undang-undang. Mereka juga mengeluarkan pernyataan sikap bersama untuk menolak penerbitan majalah /Playboy/ edisi Indonesia.

Pernyataan sikap bersama itu dikeluarkan wakil Keluarga Islam Indonesia di Britania Raya (KIBAR), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat London, Indonesia Islamic Centre-Inggris, Nadhlatul Ulama cabang Istimewa UK, beserta Pusat Informasi dan pelayanan Partai Keadilan Sejahtera United Kingdom di London, Kamis (9/3).

Menurut mantan Ketua KIBAR, Muslimin Anwar, utusan para organisasi Islam Indonesia yang berada di Kerajaan Inggris itu secara resmi menyampaikan pernyataan sikap bersama tersebut kepada Dubes RI untuk Kerajaan Inggris Dr Marty Natalegawa di Gedung KBRI London Governor Square. Muslimin Anwar pada kesempatan itu meminta agar Pemerintah RI secepatnya mengesahkan UU Anti-Pornografi dan melarang media bernuansa pornografi di Indonesia, seperti /Playboy/ dan sejenisnya. “Kami memohon pemerintah untuk menindak dengan tegas semua media yang memuat pornografi”, tegasnya.

Pada pertemuan yang bersifat kekeluargaan itu Duber Dr Marty natalegawa menyoroti adanya kesamaan elemen masyarakat Indonesia di Inggris serta tingginya perhatian masyarakat Indonesia di Inggris atas masalah-masalah yang ada di tanah air. Menurut Muslimin Anwar, pornografi dan pornoaksi dapat mengancam kualitas moral dan intelektual generasi muda bangsa Indonesia. Di



sisi lain, lanjutnya, telah banyak dimuat di media massa bahwa banyak tindakan kejahatan seksual berawal dari interaksi dengan pornografi.

Masyarakat Indonesia di Inggris Raya, lanjutnya, sangat prihatin dan kecewa dengan penyelesaian masalah majalah /Playboy/ yang berkepanjangan dan tanpa kejelasan. Masyarakat Indonesia di UK juga berdoa agar pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan semua jajarannya menjadi pemerintahan yang sensitif terhadap aspirasi rakyat, bersih dari KKN dan berwibawa.

\* MMI Somasi Gubernur Bali \*

Sementara itu, pernyataan Gubernur dan pimpinan DPRD Bali yang mengancam akan memisahkan diri dari NKRI bila RUU APP disahkan mendapat protes dari Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Ahad (12/3) kemarin, MMI pun langsung melayangkan somasi kepada dua pejabat di Pulau Dewata itu.

Dalam somasinya, Ketua Departemen Data dan Informasi MMI, Fauzan Al-Anshari menilai pernyataan tersebut merupakan bentuk tirasi minoritas dan arogansi yang bernuansa SARA serta ancaman perang terhadap kedaulatan NKRI. "Pernyataan itu juga melecehkan penduduk mayoritas muslim", ujarnya. Somasi itu dibacakan Fauzan dihadapan ribuan jamaah tablig akbar di Masjid Al-Azhar dan acara diskusi publik yang di gelar PP Muhammadiyah. "Surat somasi itu kita tembuskan ke Presiden RI, Kapolri dan Panglima TNI", tegasnya. Menurut Fauzan, pro-kontra terhadap RUU APP di dalam demokrasi merupakan hal yang wajar.

Namun, bila sudah menyatakan ancaman akan memisahkan diri dari NKRI itu telah melanggar sendi-sendi demokrasi. MMI pun mendesak agar pemerintah melalui TNI untuk segera bertindak tegas terhadap anasir disintegrasi yang nampak jelas dengan memanfaatkan momentum penolakan terhadap RUU APP.

“Jika pemerintah SBY-JK membiarkan ancaman Gubernur Bali tersebut berarti pemerintah secara langsung maupun tidak telah merestui separatisme di wilayah hukum NKRI”, tandas Fauzan. Menurut dia, bila TNI tak sanggup menanggulangi dan menghentikan sikap arogansi dan anasir separatisme tersebut, maka MMI bersama institusi Islam lainnya siap untuk menyelesaikannya.

**REPUBLIKA – Rabu, 05 April 2006 Halaman : Penulis : hri**

### **Kesadaran Pentingnya RUU APP Meningkat**

JAKARTA – Kesadaran masyarakat akan pentingnya kehadiran Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP) terus meningkat. Wakil Ketua Pansus RUU APP DPR RI, Chairunisa, mengungkapkan, beberapa kalangan yang awalnya menolak kehadiran RUU APP itu, kini mendukung RUU itu.

“Setelah kita prosentasikan RUU APP itu secara gamblang, mereka yang tadinya menolak, kini mulai mengerti”, ujar Chairunisa kepada /Republika/, kemarin. Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini, mengungkapkan, kebanyakan kalangan yang menolak itu ternyata tak mengetahui RUU APP secara utuh. Menurut Chairunisa, fakta itu diperolehnya setelah melakukan berbagai presentasi dalam berbagai forum diskusi dan seminar. Untuk itu, pihaknya berharap agar masyarakat tak terpancing dan terjebak dengan pro dan kontra.

“Jangan bilang tak setuju tapi belum membaca RUU APP, begitu sebaliknya”, imbuhnya. Pihaknya menegaskan, RUU APP merupakan prioritas DPR RI yang harus diselesaikan tahun ini. “Seharusnya, RUU ini selesai pada 2005 lalu”, tegasnya. Meski begitu, Chairunisa mengaku tak bisa mematok RUU APP itu akan selesai pada Juni 2006. Namun, pihaknya berjanji akan menuntaskan pembahasan RUU APP itu secepatnya.

Diungkapkannya, saat ini, DPR tengah memasuki masa reses. Meski begitu, pihaknya terus menerima masukan secara tertulis dari berbagai kalangan terkait RUU APP. Setelah reses berakhir, lanjut dia, RUU APP akan segera diajukan ke rapat pleno. Hingga saat ini, kata dia, belum ada pembahasan lagi mengenai substansi RUU APP.

Di tempat terpisah, Majelis Syura DPP Partai Bulan Bintang (PBB) mengingatkan pemerintah dan lembaga legislatif agar menggunakan tuntunan agama sebagai acuan dalam penyusunan RUU APP sehingga tidak terjadi perdebatan berkepanjangan di masyarakat.

Oleh karena itu, dalam penyusunan RUU APP itu, tidak layak jika pihak berwenang menanyakan pendapat dan menampung aspirasi objek hukumnya, yakni mereka yang ditengarai melakukan pornografi dan pornoaksi, kata Sekretaris Majelis Syura DPP PBB, Fuad Amsyari, kepada /Antara/ Senin.

“Adanya ketentuan pemberian sanksi pada RUU tersebut amatlah diperlukan dan sifat sanksi itu perlu membuat pelanggarnya tidak mudah mengulangi kekeliruannya. Pemberian sanksi tersebut agar tidak berasaskan delik pengaduan tetapi berasaskan delik pelanggaran atau kejahatan”, katanya.

Pengecualian terhadap tindak pornografi dan pornoaksi itu, lanjutnya hanya boleh dilakukan untuk hal-hal yang amat khusus dan terbatas, seperti untuk tujuan pendidikan dan kesehatan. “Tidak layak ada pengecualian untuk hal-hal yang bersifat penampilan secara publik seperti kesenian dan olahraga”, ujarnya.

Menurut dia, setelah RUU APP diundangkan, UU tersebut harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh perangkat pemerintahan, khususnya aparat kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Bagi daerah yang telah kuat motivasinya untuk melaksanakan UU itu, PBB menghimbau agar daerah itu memberi pengaruh positif pada daerah lainnya yang masih tertinggal.

Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Pansus RUU APP DPR RI, Chairunisa mengatakan, pembahasan RUU APP tak didasarkan pada pendekatan agama. Namun, kata dia, perumusan dan pembahasan RUU APP menggunakan tiga pendekatan, yakni filosofis, sosiologis dan yuridis. “Namun, RUU APP ini tentu tak akan terlepas dari nilai-nilai dan unsur agama”, tegasnya.

**REPUBLIKA – Kamis, 06 April 2006 Halaman : 5 Penulis : hri**

### **Warga RI di Delapan Negara Dukung RUU APP**

JAKARTA – Masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Masyarakat Indonesia di delapan negara yang tergabung dalam Aliansi Lembaga, Aktivistis, dan Mahasiswa Indonesia (ALAMI) itu juga mendesak agar RUU APP segera disahkan.

“Kami menuntut agar Pemerintah RI agar segera mencabut surat izin terbit media bernuansa pornografi di Indonesia”, ujar Koordinator ALAMI, Muslim Anwar dalam siaran persnya yang diterima /Republika/. Alami juga meminta agar pemerintah dan penegak hukum menindak dengan tegas semua media bernuansa pornografi dan pornoaksi.

ALAMI terdiri dari organisasi masyarakat Indonesia yang berada di Mesir, Inggris, Jerman, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Belanda dan Amerika Utara. Kumpulan masyarakat Indonesia di luar negeri ini juga mengajak rakyat Indonesia untuk tetap menjaga nilai-nilai mulia moral ketimuran.

“Mari kita bersama-sama menciptakan suasana dan lingkungan yang mendukung terciptanya generasi muda bangsa Indonesia yang terbaik secara spiritual, moral dan intelektual”, imbu Muslim. Selain itu, ALAMI pun menyeru kepada semua pihak yang merasa berkepentingan terhadap RUU APP ini, baik yang pro maupun yang kontra, untuk saling menahan diri dan berkepal dingin.

“Kami meminta agar tidak melibatkan diri di dalam benturan-benturan fisik, yang hanya akan memperparah dan memperkeruh masalah yang dihadapi bangsa kita”, tandasnya. Pihaknya berharap agar kelompok yang pro dan kontra untuk bersama-sama duduk satu meja dan mengedepankan dialog yang bermartabat. Menurut

ALAMI, diskusi tersebut perlu dibangun dalam suasana saling menghormati, serta tidak menggunakan cara-cara kotor seperti intimidasi yang sama sekali tidak mencerminkan watak bangsa yang berbudaya. ALAMI optimistis akan ada titik temu untuk menyelesaikan perbedaan pandangan yang ada.

Masyarakat Indonesia di luar negeri pun menolak secara keras rencana kehadiran majalah Playboy di Indonesia. “Sungguh, tidak ada kebaikan yang dibawa majalah Playboy atau media bernuansa pornografi lainnya yang sangat bertentangan dengan adat dan adab ketimuran yang kita miliki”, papar Muslim. ALAMI memaparkan, berdasarkan hasil sebuah studi tentang efek pornografi yang dilakukan Universitas Utah di Amerika Serikat. Menurut Muslim, bukti empiris dan klinis dari penelitian itu mengungkapkan bahwa pornografi itu bersifat progresif dan menimbulkan ketagihan bagi orang yang biasa mengkonsumsinya.

“Hal ini tentunya akan sangat mengancam kualitas moral dan intelektual generasi muda bangsa kita”, tandasnya. Disisi lain, kata Muslim, media massa telah banyak mengupas berbagai tindakan kejahatan seksual yang diakibatkan pornografi. ALAMI terdiri Keluarga Islam Indonesia di Britania Raya, ICMI orsat London, Indonesian Islamic Centre-Inggris, Nahdlatul Ulama cabang istimewa United Kingdom, Indoensian Muslim Youth Association (IMYA), Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera (PIP PKS) Inggris, Persatuan Pelajar Muslim Indonesia (PPMI) Mesir, LSM KHARISMA Women & Education, Jerman, Keluarga Besar Masjid Al-Falah Berlin, Jerman Keluarga Muslim Braunschweig (KMB), Keluarga Muslim Hannover (KMH) Jerman serta IIC e.V (Indonesische Islamische Center) Hamburg. Selain itu, FORKOM (Forum Komunikasi Masyarakat Muslim Indonesia se-Jerman), Indonesian Solidarity Foundation (ISF), Institute for Science and Technology Studies (ISTECS) Chapter Europe Jerman, Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera (PIP PKS) Republik Federal Jerman dan Iqro’ Foundation Inc-Sydney, Australia. Anggota ALMI lainnya adalah Keluarga Muslim Indonesia di Australia dan New Zealand

(KMI-ANZ), Persatuan Islam (PERSIS) Australia, Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera (PIP PKS) Australia dan Selandia Baru, Lingkar Studi Indonesia-Amerika, Illinois USA Pusat Informasi Partai Keadilan Sejahtera di Amerika Utara (PIPKA), Texas, ICMI Orsat Belanda, Organisasi tenaga kesehatan Indonesia (OTKIN) Nederland, Bina'ur Rijal (BR) Belanda dan Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera (PIP PKS) Belanda.

**REPUBLIKA – Senin, 22 Mei 2006 Halaman : 5 Penulis : ita / ant**

### **Demo di Berbagai Kota Dukung RUU APP**

SURABAYA– Massa pendukung disahkannya Rancangan Undang-Undang Anti pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) menjadi Undang-undang tak hanya tumpah ruah di Jakarta. Dalam waktu yang bersamaan di sejumlah daerah, Ahad (21/5) ratusan ribu massa juga turun ke jalan.

Demo mendukung RUU APP berlangsung di sejumlah kota antara lain Surabaya, Semarang, Bandung, Sampang, Mataram, Banjarmasin, dan Padang. Pengunjuk rasa menyuarakan hal yang sama : menyatakan pentingnya pemberantasan pornografi dan pornoaksi serta mendesak disahkannya RUU APP.

Di Surabaya, dukungan terhadap RUU APP dilakukan ribuan massa dari berbagai elemen dengan menggelar Tablig Akbar di Taman Bungkul. Massa antara lain berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim, Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PW) Jatim, serta Pemuda Bulan Bintang (PBB) Surabaya dan Jatim. Selain itu juga ada Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Surabaya dan Jatim, Remaja Masjid (Remas) se-Jatim, dan lainnya.

Juru bicara aksi, Kusnudin mengatakan berbagai opini negatif dibangun melalui media massa yang berpengaruh, dan ancaman yang mengada-ada dengan dalih keutuhan dan kesatuan NKRI. Bahkan dalam banyak hal menariknya dalam ranah konflik ideologi dan agama.

“Kondisi demikian sangat memprihatinkan karena penolakan justru muncul dari kelompok yang selama ini menyebut dirinya kamu intelektual, aktivis anti kekerasan terhadap perempuan, dan anak, sebagian seniman yang peduli atas



nasib bangsa, serta mereka yang secara ekonomis tergantung pada semua bentuk pornografi dan pornoaksi”, tegasnya.

Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Haji (TGH) Safwan Hakim menegaskan, umat Islam sangat membutuhkan UU APP, karena hal itu dimaksudkan untuk melindungi para generasi muda dari kehancuran moral.

“Kehancuran bangsa ini karena rusaknya moral yang sangat merugikan umat Islam, karena itu umat Islam berkewajiban mengawal RUU APP untuk segera disahkan menjadi UU”, katanya dalam Tabligh Akbar yang di gagas MUI Provinsi NTB.

Di hadapan sekitar ribuan umat muslim yang didominasi pelajar putra-putri, Safwan Hakim menyatakan penduduk Indonesia yang mayoritas muslim sangat berkepentingan atas pengesahan RUU APP tersebut.

Di Semarang, Jawa Tengah, ribuan umat Islam berbagai elemen memulai aksinya pada pukul 08.00 WIB. Ribuan massa yang semula berkumpul di Taman Keluarga Besar (KB) di Jalan Menteri Supeno, melakukan / long march / mengelilingi Lapangan Pancasila, kemudian berhenti di depan Supermarket Ramayana untuk menyampaikan berbagai tuntutan mereka.

Di Sampang Madura massa yang berasal dari Pondok Pesentren, Ormas Islam, dan LSM se-Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, melakukan aksi damai di Monumen Sampang. “Sudah banyak korban yang menimpa warga Indonesia akibat pornoaksi dan pornografi. Jadi, warga Sampang mendesak segera disahkan RUU APP menjadi Undang-undang”, tegas Ketua MUI Cabang Sampang, KH Mubassyr Mahfudz, SH di depan massa.

Aksi ribuan umat Islam di Banjarmasin dipusatkan di halaman Masjid Raya Sabilil Muhtadin. Kegiatan itu ditandai berbagai orasi dari sejumlah tokoh wanita muslim pimpinan umat Islam di Banjarmasin. Sedangkan di Padang, pendukung RUU APP tumpah ruah di lapangan Imam Bonjol.

**REPUBLIKA – Rabu, 07 Juni 2006 Halaman : 18 Penulis : kie**

### **Ribuan Orang Gelar Aksi Damai Desak RUU APP Disahkan**

BANDUNG – Aksi mendukung segera disahkannya draft I RUU APP kembali di gelar di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/6). Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Ummat Islam Jabar Anti pornografi dan Pornoaksi (ALUMI) itu berasal dari 43 Ormas, OKP, LSM, DKM, Pesantren dan partai Islam. Pada aksinya, massa menuntut agar RUU APP draft I segera disahkan paling lambat akhir Juni ini.

Ribuan massa itu mulai menggelar demo di halaman Gedung Sate pukul 09.00 WIB sampai 12.00 WIB. Khusus massa dari Persis Jabar sebelum datang ke Gedung Sate sudah melakukan /long march/ melalui jalan protokol di Kota Bandung, yaitu dari Jalan Viaduct, Jl. Wastukencana, Jl. Aceh, Jl. Merdeka, Jl. Juanda, dan berakhir di Gedung Sate.

Tidak seperti aksi biasanya, di depan Gedung Sate kemarin didirikan sebuah panggung. Jadi, setiap tokoh Islam berorasi di panggung itu agar bisa terlihat oleh ribuan massa. Ormas Islam itu membawa berbagai spanduk berisi dukungan terhadap RUU APP. Misalnya bertuliskan “Awasi revisi RUU APP”, Dukung RUU APP Pertama Tolak RUU APP Kedua dan sebagainya.

Tokoh yang memberikan orasi pada aksi damai itu, selain tokoh Islam dari NU Jabar, Persis Jabar, Muhammadiyah, Al-Irsyad, FUUI, PKS, PBB, SII, HTI, PASI dan Ormas lainnya. Gubernur Jabar Danny Setiawan pun ikut berorasi mendukung RUU APP itu segera disahkan.

Menurut Koordinator Aksi Ustadz Hedi Muhammad, 95 persen umat Islam yang ada di Jabar mendukung draft I RUU APP segera disahkan. Massa, kata dia, justru menolak draft kedua dari RUU APP itu karena sudah tidak sesuai dengan

pandangan Islam tentang pornografi dan pornoaksi dengan banyaknya pasal yang dihilangkan. Misalnya, pasal 47 yang melarang wanita memperlihatkan dadanya dihilangkan.

“Kami akan menyerahkan tuntutan kami ke Gubernur dan DPRD Jabar agar disampaikan ke pemerintah pusat. Kalau tuntutan kami tidak didengarkan juga, kami akan melakukan aksi lagi”, katanya.

Sedangkan menurut mantan penyanyi rock, Hari Mukti, untuk memperbaiki moral bangsa Indonesia RUU APP perlu segera disahkan. Memangnya, kata dia, ibu-ibu mau anaknya jadi pelacur, bapak-bapak mau anaknya menghamili orang, kalau tidak mau maka dukung RUU APP ini segera disahkan. “RUU APP itu harus kita dukung, tapi kemana atuh / teu bijil-bijil/ (/nggak/keluar-keluar)”, ujarnya.

Sementara dalam orasinya Gubernur Jabar Danny Setiawan mengatakan masyarakat Jabar mayoritas beragama Islam yang religius. Kalau ingin Jabar maju, kata dia, maka harus punya kesalehan sosial yang tinggi. Karena, tanpa masyarakat yang berahlakkul karimah akan sulit membangun Jabar.

“Saya konsisten untuk menjadikan masyarakat Jabar yang religius. Besok (Rabu, 7/6) saya akan membuat surat pengantar ke pemerintah dan DPR RI untuk menyampaikan aspirasi segera mensahkan RUU APP”, kata Danny diiringi ucapan /Allahu Akbar/.

**REPUBLIKA – Kamis, 24 Mei 2007 Halaman : 3 Penulis : wed**

### **Draf RUU APP Bahas Pemindaan Pornografi**

JAKARTA – Tim Perumus (Timus) Komisi VIII soal RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP) mencapai pemidanaan bagi pornografi ringan, pornografi berat, dan pornografi anak. Meski begitu, Timus masih berkuat pada masalah pendefinisian.

“Dalam pembahasan kali ini masih berkuat definisi. Tapi, kita sudah masih ke masalah pemidanaannya”, kata anggota Timus Komisi VIII dari Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan, Eva Kusuma Sundari di luar ruangan acara rapat tertutup pembahasan draf RUU APP di Senayan, Jakarta, Rabu (23/5).

Soal pemidanaan itu, pasal-pasal yang dibahas terbagi dalam tiga kategori, yaitu pornografi ringan, berat, dan anak. Masalah didalamnya cukup pelik karena ada beberapa hal yang terkandung dalam draf itu masih belum ada kaitan payung hukumnya.

Dia mengatakan, pembahasan draf RUU APP itu sangat lambat dan berat. Karena, draf itu diawali dengan paradigma yang salah, terutama dalam kriminalisasi perempuan dan pornografi. “Jadi kita harus benarkan dulu paradigma dan soal kriminalisasi pornografinya. Tak hanya itu, kita kaitkan dulu dengan payung hukumnya”.

Pembahasan Timus itu sudah mencapai hukuman yang perlu dijatuhkan dalam perkara pornografi. “Kita sudah dapatkan berapa saja angka-angkanya. Namun, ada beberapa hal yang mesti diubah. Jadi, subyeknya dulu, baru hukumannya”.

Karena itu, luasnya masalah yang perlu diatur didalamnya, mengakibatkan ada kemungkinan jumlah pasalnya menjadi lebih banyak dari 38 pasal yang disiapkan

dalam draf awal. Beberapa hal yang diperluas adalah mengenai pasal pemidanaan yang terus dipecah-pecah lagi. Contohnya adalah soal aktor dalam pornografi tersebut. Bila aktornya adalah anak-anak, termasuk dalam visual berbentuk kartun atau penggunaan figur anak-anak, maka kategori hukumannya masuk ke pidana ringan atau berat.

“Sekarang, yang jadi pertanyaan adalah, pemberatan (hukumannya) itu seperti apa? Kita belum sampai ke sana. Demikian juga soal denda dan lain-lain”, ujar Eva.

Menyangkut anak-anak, Timus sudah mempelajari dari hasil kunjungan ke Amerika Serikat. Di sana, katanya, penekanannya adalah pada pemidanaan pornografi anak. Itu ditujukan pada perlindungan dampak negatif ke anak-anak yang sudah jadi komitmen bersama. “Karena itu, pemidanaannya pun harus lebih diberatkan lagi”, kata Eva.

Untuk itulah, Timus sendiri berencana untuk mengundang para pakar pidana. Mereka nantinya diminta untuk menentukan rumusan berapa maksimal hukumannya. “Semua bahasan itu nantinya dikembalikan lagi ke fraksi-fraksi di komisi.